



No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
	dan Kebudayaan				11 Januari 2024
		SUPM Negeri Kupang	759,38	2022	Belum disetor
		Jumlah	6.985,18		

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.5 dan N.5.1

7) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.175.473.484,10	Rp1.174.124.266,10

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2023 senilai Rp1.175.473.484,10 mengalami kenaikan senilai Rp1.349.218,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.174.124.266,10, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilunasi oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp953.103.583,50 ditambah koreksi saldo piutang tahun 2022 senilai Rp56.198.414,00 dikurangi penysetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp52.757.050,00.
- Piutang Pajak Air Permukaan senilai Rp218.928.536,60 yang diperoleh dari saldo awal Piutang senilai Rp221.020.682,60 ditambah koreksi saldo awal karena adanya perhitungan kembali senilai Rp82.045,00 dikurangi penysetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp2.174.191,00.

Atas saldo Piutang Pajak Daerah terdapat piutang berlarut-larut atau berumur lebih dari 5 (lima) tahun per 31 Desember 2023 yaitu Piutang Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp 168.752.336,60.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2

8) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp2.238.620.565,00	Rp2.421.647.000,00

Piutang Retribusi Pada Tahun 2023 senilai Rp2.238.620.565,00 mengalami penurunan senilai Rp183.026.435,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.421.647.000,00, yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp14.256.000,00 merupakan Piutang Retribusi Jasa Pemakaian *Incenerator* pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp2.224.364.565,00 yang terdiri dari:



- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp2.214.489.565,00 dikelola oleh 4 (empat) SKPD yakni:
- (a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.350.175.490,00 merupakan selisih antara saldo awal senilai Rp1.349.825.000,00 ditambah koreksi terhadap Piutang Tahun sebelumnya senilai Rp325.000,00 dan ditambah dengan pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp37.675.490,00 dikurangi penyetoran piutang tahun 2023 senilai Rp37.650.000,00;
 - (b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp477.625.000,00 terdiri dari sewa Alsintan dan pemakaian kekayaan daerah. Saldo senilai Rp477.625.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp476.125.000,00 ditambah pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp8.250.000,00 dikurangi penyetoran sewa Alsintan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp6.750.000,00;
 - (c) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp363.689.075,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp104.200.000,00 dikurangi penyetoran Tahun 2023 senilai Rp3.850.000,00 dan Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp237.952.075 dikurangi penyetoran ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2023 senilai Rp2.715.000,00; dan
 - (d) Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT senilai Rp23.000.000,00 merupakan retribusi sewa rumah dinas. Saldo piutang diperoleh dari koreksi pengakuan piutang tahun sebelumnya senilai Rp7.700.000,00 ditambah Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp15.300.000,00.
- (2) Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan senilai Rp9.875.000,00 merupakan Piutang sewa bangunan untuk kantin kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT senilai Rp5.200.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT senilai Rp4.675.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.7, N.7.1, N.7.1.1, N.7.2, N.7.2.1, N.7.2.1.1, N.7.2.1.2, N.7.2.1.3, N.7.2.1.4, N.7.2.1.5, N.7.2.1.5, N.7.2.1.6, N.7.2.2, N.7.2.2.1, dan N.7.2.2.2**



9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp24.583.581.893,78	Rp134.282.043.655,25

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp24.583.581.893,78 yang mengalami penurunan senilai Rp109.698.461.761,47 dari tahun sebelumnya senilai Rp134.282.043.655,25, di mana Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes dan Piutang Pendapatan Denda dengan rincian sebagai berikut.

a) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp4.818.943.910,78	Rp123.727.240.542,25

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2023, senilai Rp4.818.943.910,78 yang mengalami penurunan senilai Rp118.908.296.631,47 dari tahun sebelumnya sebesar Rp123.727.240.542,25. Piutang ini diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah. Atas nilai piutang tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- (1) Terdapat Piutang yang berlarut-larut, di mana piutang tersebut merupakan piutang yang diakui pada tahun 2018 s.d. 2021 dan tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan senilai Rp551.160.593,60;
- (2) Terdapat Piutang senilai Rp1.701.320.000,00 atas KSP Tanah dan Bangunan Eks Hotel Sasando Timor Internasional yang belum dibayarkan dari tahun 2021 s.d. 2023. KSP ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Manfaat Nomor BU.030/180/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019. PT Flobamor telah mengajukan surat permohonan untuk mengakhiri perjanjian KSP Tanah dan Bangunan Eks Hotel Sasando Timor Internasional milik Pemerintah Provinsi NTT tanggal 28 Agustus 2023. Atas permohonan ini masih dalam proses dan belum terdapat surat PHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- (3) Terdapat Piutang atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) senilai Rp715.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.49 Rincian Piutang dengan Status PHK

No.	Pihak Mitra Kerja	Nomor Perjanjian Kerja Sama/Tanggal	Nomor Pemutusan Hubungan Kerja/Tanggal	Nilai Piutang (Rp)
1	PT Cladtek Asian Spool Bese	BU.030/03/BPAD/2020 13 Januari 2020	BU.030/626.a/BPAD/2022 31 Agustus 2022	475.915.000,00
2	PT Kupang Resources	HK.802.2014 10 September 2014	BU.030/183/BPAD.2021 10 Desember 2021	240.000.000,00

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.1.

b) Piutang Pendapatan BLUD

Piutang 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Pendapatan **Rp19.763.019.233,00** **Rp10.553.072.128,00**
BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD pada Tahun 2023 senilai Rp19.763.019.233,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp9.209.947.105,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp10.553.072.128,00. Piutang ini merupakan tagihan atas Pelayanan Kesehatan kepada Pihak ketiga termasuk di dalamnya kepada BPJS dan Klaim Obat pada BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang.

Pengakuan Piutang Pelayanan Kesehatan

Atas Piutang Pendapatan BLUD dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

- (1) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Obat Kronis tahun 2023 senilai Rp972.357.765,00 terdiri atas saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp603.900.804 atas nilai tersebut pihak RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan.
- (2) Saldo Piutang Pelayanan Gigi Palsu senilai Rp52.800.000,00 merupakan klaim kepada BPJS atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00. Pada tanggal 27 September 2023, BPJS Cabang Kupang mengirimkan surat kepada seluruh Faskes perihal Penjaminan Pelayanan Prothesa Gigi Pada Fasilitas Kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelayanan prothesa gigi hanya diberikan atas rekomendasi dokter gigi FKTP atau dokter gigi spesialis prostodonsia pada FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selama ini pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes yang melakukan pelayanan prothesa gigi bukanlah dokter spesialis prostodonsia dan pada tahun 2023 pengajuan klaim atas pelayanan tersebut disetujui dan dibayarkan sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan surat dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes



kepada BPJS Kesehatan Kupang perihal Permintaan Pembayaran Tagihan Klaim Gigi Palsu Bulan Agustus dan September tanggal 23 Oktober 2023 dijelaskan bahwa pelayanan dilakukan sebelum surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan diterima, syarat mengenai dokter yang menangani pelayanan prothesa gigi diwajibkan dokter spesialis baru diketahui pihak RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes saat surat tersebut dikeluarkan, belum terdapat sosialisasi dari pihak BPJS terkait dengan syarat tersebut, sehingga Piutang atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00 masih tetap diakui.

- (3) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.433.845.256,00 yang terdiri dari saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp748.257.725,00 ditambah dengan Piutang dan Pendapatan atas Pelayanan JKN 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan atas Piutang bawaan dari tahun sebelumnya. Piutang dan Pendapatan murni tahun 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 merupakan hasil verifikasi BPJS dengan status layak yang dituangkan dalam BAHV pada tahun 2023 senilai Rp446.743.100,00 dan tahun 2024 senilai Rp14.238.844.431,00. Rincian Piutang murni tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Piutang Tahun 2023 yang Bersumber dari Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Layak pada Tahun 2023 dan 2024

No	Bulan Pelayanan	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
A. BAHV 2023					
1	Juli	Layak	446.743.100,00	4009/BA/XI-04/1223	22 Desember 2023
Subtotal BAHV 2023			446.743.100,00		
B. BAHV 2024					
1	Juli	Layak	2.740.100,00	93/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
2	Agustus	Layak	2.428.904.582,00	92/BA/XI-04/0124 368/BA/XI-04/0224	10 Januari 1 Februari 2024
3	September	Layak	2.786.333.753,00	586/BA/XI-04/0424	23 Februari 2024
4	Oktober	Layak	46.040.000,00	964/BA/XI-04/0424	1 April 2024
5	November	Layak	2.711.751.175,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024



No	Bulan Pelayanan	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
6	Desember	Layak	6.263.064.441,00	270/BA/XI-04/0124	24 Januari 2024
Subtotal BAHV 2024			14.238.844.031,00		
Total			14.685.587.131,00		

Selain itu, terdapat hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim Pelayanan JKN pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dikategorikan dalam status tidak layak senilai Rp173.555.450,00, status *pending* senilai Rp2.682.207.175,00 dan dinyatakan sebagai potongan senilai Rp2.758.416.507,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Tidak Layak, *Pending* dan Dinyatakan Sebagai Potongan

No	Bulan Pelayanan	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
Hasil Verifikasi Tidak Layak				
1	Januari	10.801.308,00	1745/BA/XI-04/0523	5 Juni 2023
2	Februari	15.632.700,00	1894/BA/XI-04/0623	20 Juni 2023
3	Maret	3.310.600,00	2062/BA/XI-04/0723	12 Juli 2023
5	Mei	62.207.825,00	3270/BA/XI-04/1023 2702/BA/XI-04/0923 1893/BA/XI-04/0623	25 Oktober 2023 7 September 2023 20 Juni 2023
6	Juni	49.171.300,00	3490/BA/XI-04/1123	13 November 2023
7	Juli	20.840.700,00	3820/BA/XI-04/1223	8 Desember 2023
8	Agustus	9.951.400,00	92/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
9	September	1.839.525,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
Jumlah Hasil Verifikasi Tidak Layak		173.555.450,00		
Hasil Verifikasi <i>Pending</i>				
1	Agustus	529.547.000,00	358/BA/XI-04/0224	1 Februari 2024
2	September	9.394.400,00	586/BA/XI-04/0424	23 April 2024
3	November	136.109.100,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024
4	Desember	2.007.156.675,00	270/BA/XI-04/0124	24 Januari 2024
Jumlah Hasil Verifikasi <i>Pending</i>		2.682.207.175,00		
Hasil Verifikasi Dinyatakan Sebagai Potongan				
1	2022	1.462.718.000,00	152/BA/XI-04/0123 1441/BA/XI-04/0523	18 Januari 2023 8 Mei 2023
2	Jan-23	64.403.307,00	596/BA/XI-04/0223	27 Februari 2023
3	Mar-23	372.563.200,00	1256/BA/XI-04/0423	14 April 2023
4	Apr-23	94.286.500,00	1618/BA/XI-04/0523	19 Mei 2023
5	Jun-23	188.689.600,00	2195/BA/XI-04/0723	18 Juli 2023
6	Sep-23	335.797.600,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
7	Okt-23	249.958.300,00	3605/BA/XI-04/1123	22 November 2023
Jumlah Potongan		2.758.416.507,00		

Atas hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim yang diajukan oleh RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes dengan status *Pending*,



Tidak Layak dan Potongan tidak diakui sebagai bagian Piutang milik Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya terdapat perbedaan nilai antara piutang pelayanan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan utang yang diakui oleh Pengguna Jasa Layanan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian Perbedaan Pengakuan Piutang Pemprov NTT dan Utang Pengguna Layanan

No	Nama	Piutang yang Dicatat oleh RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang (Rp)	Nilai Utang yang Dicatat Pengguna Layanan (Rp)	Selisih (Rp)
1	RS Siloam Kupang	27.622.150,00	0,00	27.622.150,00
2	Mandiri Inhealth	109.755.329,00	88.108.876,00	21.646.453,00
	Jumlah	137.377.479,00	88.108.876,00	49.268.603,00

Atas Piutang tersebut masih dilakukan rekonsiliasi dengan Pihak Pengguna Layanan.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.2.

c) Piutang Denda

Piutang Denda	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.618.750,00	Rp0,00

Saldo Piutang Denda Tahun 2023 senilai Rp1.618.750,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 merupakan denda yang dikenakan atas Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum dibayarkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.618.750,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.3.

d) Piutang atas Fasilitas TDF

Piutang atas Fasilitas TDF	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp1.730.985,00

Saldo Piutang atas Fasilitas TDF Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp1.730.985,00. Deposito senilai Rp1.730.985,00 yang diperoleh dari *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara nontunai melalui TDF Tahun 2022.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.4.



10) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.402.342.165,00	Rp2.353.300.510,00

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di mana saldo Tahun 2023 senilai Rp1.402.342.165,00 mengalami penurunan senilai Rp950.958.345,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.353.300.510,00 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dana Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut.

- Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp1.179.342.165,00 merupakan bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda empat tahun 2023 yang diperoleh dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat tahun 2022 senilai Rp2.130.300.510,00 ditambah bagian lancar kredit kendaraan tahun 2023 senilai Rp1.179.342.165,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp2.130.300.510,00.
- Pada Tahun 2023, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp223.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum dilunasi.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.9, N.9.1, N.9.1.1, N.9.1.1.1, N.9.1.1.1.1, N.9.1.1.1.2, N.9.1.2, dan N.9.1.2.1

11) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp9.404.123.480,24)	(Rp6.698.423.713,60)

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai (Rp9.404.123.480,24) merupakan penyisihan atas nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 dan saldo Penyisihan Piutang pada 31 Desember 2022 senilai (Rp6.698.423.713,60) atau mengalami kenaikan senilai Rp2.705.699.766,64. Penyisihan Piutang ini merupakan nilai piutang yang disisihkan berdasarkan kategori pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

a) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp9.175.226.769,41) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.53 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.150.385.384,10)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.096.342.743,85)



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.939.498.841,46)
	Jumlah	(9.175.226.769,41)

- b) Penyisihan Piutang Lainnya (Rp228.896.710,83) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.54 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(5.696.710,83)
2	Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)
	Jumlah	(228.896.710,83)

12) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Dimuka Rp7.289.642.523,50 Rp194.398.745,52

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.289.642.523,50 mengalami kenaikan senilai Rp7.095.243.777,98 dari tahun sebelumnya senilai Rp194.398.745,52. Beban Sewa Dibayar Di muka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

Tabel 5.55 Daftar Beban Dibayar Di muka per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas (Cabang Dinas di Kabupaten)	126.791.666,67
		Sewa Rumah Dinas	46.750.000,00
b)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas (UPT di Kabupaten)	2.916.666,67
c)	Dinas Pendidikan	Progres Fisik Pekerjaan	7.113.184.190,16
	Jumlah		7.289.642.523,50

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran N.10, N.10.1, dan N.10.2

13) Persediaan

Persediaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp350.609.548.677,09 Rp262.735.931.771,53

Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah senilai Rp350.609.548.677,09 mengalami kenaikan senilai Rp87.873.616.905,56 dari tahun sebelumnya senilai Rp262.735.931.771,53 di mana perhitungan persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan *stock opname* barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp350.609.548.677,09 terdiri dari:



- a) Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp263.037.503.690,09 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.56 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	
	Inspektorat Daerah	10.833.343,00
	Badan Penghubung	1.550.100,00
	Badan Kepegawaian Daerah	19.139.710,00
	Dinas Peternakan	2.844.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.667.885,00
2	Alat Kebersihan	
	Badan Penghubung	469.600,00
3	Cinderamata (Plakat)	
	Sekretariat Daerah	133.752.780,00
4	Persediaan Listrik	
	Badan Penghubung	47.400,00
	Dinas Peternakan	1.000.000,00
5	Persediaan Barang Cetak	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	43.487.722,60
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	789.284.563,78
6	Bahan Laboratorium	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	3.728.008.727,30
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid 19)	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.057.237,50
7	Persediaan Barang Habis Pakai	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	167.188.320,53
8	Persediaan Bahan Linen	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	45.161.660,00
9	Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	
	Dinas Kesehatan	600.481.629,45
10	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	
	Dinas Peternakan	8.051.450,00
11	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	
	Dinas Peternakan	20.470.400,00
12	Persediaan Bibit Ternak	
	Dinas Peternakan	687.950.000,00
13	Persediaan Bibit Tanaman	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	159.842.000,00
14	Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	
	Dinas Kesehatan (OVABEKES)	784.997.744,13
	Dinas Kesehatan (RSJ)	236.205.670,50



No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	7.848.931,37
15	Persediaan Bahan Obat-obatan	
	Dinas Kesehatan	156.962.543.535,14
	Dinas Peternakan	115.884.083,00
	Sekretariat Daerah	14.159.300,00
16	Persediaan Farmasi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	14.138.176.483,97
17	Persediaan Radiologi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.001.537.231,00
18	Persediaan Bahan Makanan	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	73.995.464,00
19	Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	
	Dinas Peternakan	750.735.680,00
20	Bahan Reagensia	
	Dinas Kesehatan	637.508.703,84
21	Alat Kantor Lainnya	
	Dinas Peternakan	7.317.000,00
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.880.000,00
	Dinas Sosial	168.728.055,00
23	Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	81.587.317.079,00
	Jumlah	263.037.503.690,09

- b) Persediaan Barang Lainnya senilai Rp87.572.044.987,00 merupakan Persediaan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp172.800.000,00 dan Persediaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp87.399.244.987,00.

Atas saldo Persediaan tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- (a) Terdapat persediaan dari TA 2021 yang belum diserahkan kepada masyarakat tetapi sudah digunakan oleh masyarakat dengan detail sebagai berikut.
- (1) Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Lintas Batas Kota Kupang-Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) merupakan persediaan berupa ruas jalan yang akan diserahkan kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pengadaan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada bulan September 2021 jalan telah digunakan langsung oleh masyarakat;



- (2) Pekerjaan Perbaikan Saluran Irigasi Air Sagu di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang merupakan pengadaan perbaikan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada Desember 2021 saluran tersebut telah digunakan langsung oleh masyarakat; dan
 - (3) Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai merupakan Pengadaan proyek dilakukan pada tahun 2021 dan selesai pada 22 November 2021 dengan *Final Hand Over* (FHO) pada tanggal 2 Juni 2022.
- (b) Pengelolaan Persediaan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) belum dilakukan secara komprehensif oleh BPAD. BPAD hanya mencatat persediaan SKP-D yang masih berada pada Pengurus Barung BPAD ditambah dengan persediaan SKP-D pada empat UPTD Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur, tanpa mencatat sisa persediaan SKP-D yang berada pada 18 UPTD Pendapatan Daerah lainnya.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.11**

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp824.154.472.607,73	Rp865.331.161.186,46

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2023 senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp41.176.688.578,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp865.331.161.186,46 yang terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp1.367.363.828,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp1.367.363.828,00 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat yang telah selesai.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.12**



2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Jangka Panjang **Rp824.154.472.607,73** **Rp863.963.797.358,46**
Permanen

Pada Tahun 2023 saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp39.809.324.750,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp863.963.797.358,46. Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel 5.57 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Metode
1	Bank NTT	650.037.827.919,04	689.504.325.854,15	Ekuitas
2	PT Jamkrida	156.144.242.474,42	152.054.933.208,20	Ekuitas
3	PT Flobamor	817.181.934,27	3.267.270.457,11	Ekuitas
4	PT KI Bolok	15.755.220.280,00	17.537.267.841,00	Ekuitas
5	PT ASKRIDA	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Biaya
	Jumlah	824.154.472.607,73	863.963.797.358,46	

Adapun rincian perhitungan setiap BUMD adalah sebagai berikut.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04. Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 25,51%. Perhitungan saldo Investasi pada PT Bank NTT tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.58 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1	Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp689.504.325.854,15
2	Ditambah:	
	- Bagian Laba Tahun 2023 : 25,51% x Rp.104.572.733.897 (<i>audited</i>)	Rp26.676.504.417,12
3	Dikurangi:	
	- Penerimaan Dividen	Rp53.979.253.232,00
	- Koreksi Perhitungan	Rp590.535.570,55
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp11.573.213.549,88
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp650.037.827.919,04

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.



Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2023 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp525.007.000.000,00 dan tidak ada penambahan setoran modal pada tahun 2023. Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp525.007.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp66.143.002.352,23 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2023 senilai Rp26.676.504.417,12 ($25,51\% \times \text{Rp}104.572.733.897,00$).

Atas Laporan Keuangan PT Bank NTT Tahun telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 26 Maret 2024.

- b) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp617.181.934,27. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,90% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,10% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.59 Perhitungan Investasi PT Flobamor

1	Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp3.267.270.457,11
2	Ditambah:	
	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp450.083.395,12
3	Dikurangi:	
	Rugi Tahun 2023: $99,90\% \times \text{Rp}2.598.743.480,00$ (<i>unaudited</i>)	Rp2.595.145.736,52
	- Koreksi Perhitungan	Rp505.026.181,44
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp617.181.934,27

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2023 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah karena terus mengalami kerugian sehingga menyebabkan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT terkoreksi pada tahun 2022 senilai Rp3.267.270.457,11 (*equity method*) ditambah penyesuaian nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dikurangi Rugi Tahun 2023 senilai Rp2.595.145.736,52 dan koreksi perhitungan terhadap laba tahun 2022 yang tidak disetor ke Kas Daerah senilai Rp505.026.181,44 sehingga saldo awal Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi senilai Rp617.181.934,27.

Tahun 2023 PT Flobamor tidak menyetor deviden laba tahun 2022 senilai Rp505.026.181,44 (Bagian Laba Tahun 2021:



99,00% x Rp510.127.456,00) dan terdapat kenaikan nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dan pengumuman rugi tahun 2023 senilai (Rp2.597.743.480,00) yang secara otomatis mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp2.595.145.736,52 (Bagian Rugi Tahun 2023: 99,90% x Rp2.597.743.480,00) sehingga nilai investasi Pemprov NTT sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp617.181.934,27.

- c) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida adalah senilai Rp156.144.242.474,42. Penyertaan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,80% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,20% milik GKPRI Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.60 Perhitungan Investasi PT Jamkrida

1	Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp152.054.933.206,20
2	Ditambah:	
-	Bagian Laba Tahun 2023 99,80% X 13.617.432.361,00 (Audited)	Rp13.590.197.496,28
-	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp3.260.284.696,31
3	Dikurangi:	
-	Penerimaan Dividen	Rp6.384.360.405,00
-	Koreksi Perhitungan	Rp6.376.812.519,37
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp156.144.242.474,42

Total Penyertaan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp129.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Labanya bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT pada PT Jamkrida senilai Rp156.144.242.474,42 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp129.000.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp9.500.888.228,06 ditambah perhitungan bagian Dividen terhadap laba tahun 2023 senilai Rp13.590.197.496,28 (99,80% x Rp13.617.432.361,00).



- d) Penyertaan Modal pada PT KI Bolok senilai Rp15.755.220.280,00. Penyertaan Modal pada PT KI Bolok menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 100% milik Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.61 Perhitungan Investasi PT KI Bolok

1	Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp17.537.267.841,00
2	Dikurangi:	
	Rugi Tahun 2023 : 100,00% X - (Rp1.782.047.561,00) (<i>Unaudited</i>)	Rp1.782.047.561,00
3	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp15.755.220.280,00

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT tidak menambah Penyertaan Modal sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2022 sama dengan total penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 yakni Rp22.000.000.000,00. Sesuai laporan keuangan (*Unaudited*) PT KI Bolok terus mengalami kerugian setiap tahun dan di tahun 2023 senilai (Rp1.782.047.561,00). Dengan menggunakan metode ekuitas maka saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tercatat hanya senilai Rp15.755.220.280,00 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp22.000.000.000,00 ditambah koreksi nilai Ekuitas pada tahun buku 2021 senilai Rp80.680.003,54 dikurangi akumulasi perhitungan kerugian laba 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun buku 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang secara total diakumulasi menjadi senilai (Rp6.325.459.723,54) (Rp1.770.832.029,54 + Rp1.250.300.544,00 + Rp1.522.279.589,00 + Rp1.782.047.561,00)

- e) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Askrida senilai Rp1.600.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT Askrida sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.600.000.000,00 atau tidak ada penambahan modal disetor pada tahun 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.13**

c. Aset Tetap

Aset Tetap	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp9.308.575.197.201,92	Rp9.843.614.899.262,26

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp9.308.575.197.201,92 mengalami penurunan senilai



Rp535.039.702.060,34 dari tahun sebelumnya senilai Rp9.843.614.899.262,26 yang disajikan berdasarkan nilai buku dari aset tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4
1	Tanah	2.935.540.314.812,51	2.946.035.625.118,05	(10.495.310.305,54)
2	Peralatan dan mesin	1.983.477.478.890,68	1.735.225.417.396,36	248.252.061.494,32
3	Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017,84	2.297.838.521.596,67	163.433.068.421,17
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	6.619.220.932.207,81	6.509.714.653.635,49	309.506.328.572,32
5	Aset tetap lainnya	245.951.097.870,39	222.888.117.017,39	23.062.980.853,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	185.885.865.804,05	221.575.002.029,50	(35.679.136.225,45)
7	Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401,36)	(4.089.652.437.531,20)	(1.233.119.694.870,16)
	Jumlah	9.308.575.197.201,92	9.843.614.899.262,26	(535.039.702.060,34)

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp535.039.702.060,34 atau -5,44%. Rincian masing-masing aset tetap sebagai berikut.

1) Tanah

Tanah 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp2.935.540.314.812,51 Rp2.946.035.625.118,05

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp2.935.540.314.812,51 merupakan nilai seluruh aset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022	2.946.035.625.118,05
2	Penambahan:	42.358.278.156,00
	Penilaian Kembali Nilai Tanah dari Kemkes	9.167.478.156,00
	Penilaian Kembali Nilai Tanah di BPAD	33.190.800.000,00
3	Pengurangan:	52.853.588.461,54
	Hibah ke KONI	4.000.000.000,00
	Koreksi Karena Double Catat Tanah di Dinas ESDM	1.500.000.000,00
	Koreksi Karena Double Catat Tanah di Bapelitbangda	1.925.000.000,00
	Reklas ke KSP dan BGS	125.000.000,00
	Koreksi Nilai Pemanfaatan Aset	33.140.738.461,54
	Reklas ke Properti Investasi	12.162.850.000,00
4	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 (1+2-3)	2.935.540.314.812,51



Tabel 5.64 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.344.464.584,52			318.344.464.584,52
2.	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	35.061.700.000,00			35.061.700.000,00
3.	Dinas Kesehatan	66.249.200.000,00	9.167.478.156,00		75.416.678.156,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	360.918.640.285,70			360.918.640.285,70
5.	Dinas Sosial	21.307.665.000,00			21.307.665.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.126.250.000,00		2.126.250.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.787.554.896,00		2.126.250.000,00	51.631.704.896,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.532.843.180,00			5.532.843.180,00
9.	Dinas Pemubangan	40.817.883.501,00			40.817.883.501,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.652.000.000,00			4.652.000.000,00
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.448.000.000,00		4.000.000.000,00	12.448.000.000,00
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.676.000.000,00			227.676.000.000,00
13.	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	4.684.511.000,00			4.684.511.000,00
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.652.207.019,31			86.652.207.019,31
15.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.472.460.400,00			13.472.460.400,00
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.720.582.350,00			42.720.582.350,00
17.	Dinas Peternakan	29.574.125.078,52		125.000.000,00	29.449.125.078,52
18.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.439.885,00		1.500.000.000,00	31.439.885,00
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.377.610.000,00			20.377.610.000,00
20.	Sekretariat Daerah	276.076.630.000,00		44.798.000.000,00	231.278.630.000,00
21.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.333.500.000,00			40.333.500.000,00
22.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.825.000.000,00		1.825.000.000,00	0,00
23.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.253.373.064.138,00	78.113.800.000,00	45.428.588.461,54	1.286.058.275.676,46
24.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00			1.750.000.000,00
25.	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.298.400.000,00			7.298.400.000,00
26.	Inspektorat Daerah	1.600.000.000,00			1.600.000.000,00
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.697.314.000,00			13.697.314.000,00
	Jumlah	2.946.035.625.118,95	89.407.528.156,00	99.902.838.461,54	2.936.540.314.812,51

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.946.035.625.118,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp89.407.528.156,00 dan pengurangan senilai Rp99.902.838.461,54 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai



Rp2.935.540.314.812,51. Terdapat perbedaan senilai Rp47.049.250.000,00 antara mutasi aset tetap tanah secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset tetap tanah di SKPD. Hal ini dikarenakan mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di mana tanah yang digunakan oleh Pemerintah selaku Pengelola Barang untuk menghasilkan pendapatan melalui KSP dan BGS, sehingga dipindahkan dari SKPD selaku pengguna Barang ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengelola barang.

Atas aset Tetap Tanah terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dicatat dalam KIB A dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Daftar Tanah pada Sekolah yang Belum Dicatat pada KIB A

No.	Nama Sekolah	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan Tanah	Tahun Bukti Kepemilikan Tanah
1	SMA Negeri Kotolin	8.659	Sertifikat Hak Pakai No 00012 an Pemerintah Prov NTT	2023
2	SMA Negeri Fatukopa	16.000	BAST Hibah Tanah	2020
3	SMK Negeri Mole Tengah	18.600	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun
4	SMK Negeri 1 Boleng	26.880	BAST Hibah Tanah	2020
5	SMA Negeri 3 Komodo	9.600	BAST Hibah Tanah	2009
6	SMKN Amfoang Selatan	7.028	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun

- b) Terdapat sertifikat Tanah milik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diserahkan atau tidak dikuasai oleh Bidang Aset BPAD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Daftar Sekolah dengan Sertifikat Tanah yang Belum Diserahkan atau Belum Dikuasai oleh Bidang Aset BPAD

No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
1	SMAN 2 Lembor Selatan	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Manggarai Barat	Tidak diketahui
2	SMKN Mantaing	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Alor	Tidak diketahui
3	SMAN 2 Kupang	Salinan sertifikat	Pemerintah Kota Kupang	Tidak diketahui
4	SLBN Kanatang	Salinan sertifikat	Korp Pegawai Republik Indonesia Tingkat II Sumba Timur	Tidak diketahui
5	SMKN 1 Waingapu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Sumba Timur	Tidak diketahui
6	SMAN 2 Jerebuu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui
7	SMAN 2 Bajawa	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui



No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
8	SMAN 1 Mauponggo	Salinan sertifikat	Departemen Pendidikan Nasional Indonesia	Tidak diketahui
9	SMAN 9 Kupang	Sertifikat asli	Pemerintah Kota Kupang	SMAN 9 Kupang
10	SMAN 1 Komodo	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Barat	SMAN 1 Komodo
11	SMAN 2 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMAN 2 Borong
12	SMKN 1 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMKN 1 Borong

- c) Terdapat sertifikat tanah pada SMAN 1 Lewa yang masih mengatasnamakan pemilik lama atau belum berpindah ke Pemerintah Provinsi NTT seluas 20.000 m².

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp1.983.477.478.890,68 Rp1.735.225.417.396,36

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp1.983.477.478.890,68 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	1.735.225.417.396,36
2	Penambahan:	265.244.196.417,40
	Belanja Modal TA 2023	193.621.760.165,50
	Utang	77.123.500,00
	Penambahan Utang BLUD-RSUD	242.700.000,00
	Koreksi Nilai P2D	559.921.381,00
	Pindah ke Rusak Berat di Dinas Koperasi	60.000.000,00
	Reklas Antar KIB	18.721.939.405,90
	Hibah	51.788.151.965,00
	Koreksi Kurang Catat di Sekretariat Daerah	7.000.000,00
	Reklas dari Barjas	10.710.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Pendidikan	154.870.000,00
3	Pengurangan:	16.992.134.923,08
	Hibah	834.890.000,00
	Reklas Antar KIB	8.243.476.500,00
	Reklas ke Barjas	588.043.235,00
	Koreksi Lebih Catat di BPSDM	90.000.000,00
	Koreksi Lebih Catat di BKD	173.800.000,00
	Koreksi Lebih Catat di Dinas Pendidikan	22.425.000,00
	Kapitalisasi	173.345.050,00
	Penghapusan Aset	2.014.530.902,00
	ATB	142.340.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Utang	470.966.349,00
	Rusak Berat	4.238.347.887,08
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	1.983.477.478.890,68

Tabel 5.68 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	844.311.038.696,13	144.973.343.135,90	53.425.000,00	989.230.956.731,03
2	RSU Prof. Dr W.Z. Johannes	247.963.258.939,60	54.325.157.105,00	8.714.556.999,00	293.574.449.045,60
3	Dinas Kesehatan	144.764.561.918,00	1.583.958.379,00	684.875.180,00	145.663.843.117,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	42.990.725.646,00	288.288.564,00	226.900.000,00	43.022.414.409,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.048.956.804,00	-	-	4.048.956.804,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	19.758.937.548,00	37.295.000,00	-	19.796.232.548,00
7	Dinas Sosial	13.217.048.430,02	281.745.356,00	257.276.065,00	13.241.515.735,02
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.763.580.759,00	251.671.999,00	-	2.015.252.758,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.915.977.305,94	10.451.768.301,00	2.590.000,00	65.764.155.609,94
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.642.540.004,00	-	-	2.642.540.004,00
11	Dinas Perhubungan	92.163.818.258,40	39.877.199.206,00	-	92.041.017.493,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.671.575.288,99	330.572.999,00	-	8.002.548.287,99
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.854.213.453,00	-	-	5.854.213.453,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.677.788.956,00	-	104.000.000,00	4.573.788.956,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.161.301.654,00	180.604.000,00	57.900.000,00	4.264.005.654,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.436.231.614,00	121.904.000,00	266.600.000,00	6.291.535.614,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.698.137.728,00	3.954.639.180,00	74.118.180,00	32.578.658.708,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.788.798.024,95	-	223.035.000,00	3.565.763.024,95
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.617.499.847,00	5.416.255.744,00	394.049.999,00	61.639.705.592,00
20	Dinas Peternakan	9.561.472.929,05	1.685.425.000,00	872.300.000,00	10.374.697.929,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.471.424.248,00	-	-	4.471.424.248,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.490.278.509,85	493.000.000,00	158.750.000,00	4.824.528.509,85
23	Sekretariat Daerah	56.509.266.962,82	2.595.797.008,50	4.737.818.947,00	54.367.245.024,42
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.014.343.039,00	82.823.750,00	5.231.340.000,00	14.875.826.789,00
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.877.979.273,00	-	-	4.877.979.273,00
26	Badan Pendapatan dan Ases Daerah	50.437.090.351,43	8.281.480.968,00	4.524.477.498,00	54.194.104.881,43
27	Badan Keutungan Daerah	8.315.281.899,00	115.301.190,00	-	8.430.643.089,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	7.008.704.608,00	324.859.020,00	-	7.333.563.628,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.050.996.267,08	280.493.000,00	1.483.008.315,08	7.848.392.952,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	1.715.470.000,00	26.974.000,00	151.028.450,00	1.590.415.450,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	6.412.369.269,00	662.100.000,00	-	6.074.469.269,00
32	Inspektoral Daerah	8.112.025.913,00	15.297.000,00	205.052.796,00	4.921.460.117,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.453.230.217,00	29.125.000,00	-	1.482.355.217,00
	Jumlah	1.735.225.417.396,36	276.655.883.913,40	28.403.822.419,08	1.983.477.478.890,68

Berdasarkan saldo awal senilai Rp1.735.225.417.396,36 maka terjadi kenaikan senilai Rp276.655.883.913,40 dan penurunan senilai Rp28.403.822.419,08 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp1.983.477.478.890,68. Terhadap perbedaan senilai Rp1.411.687.496,00 antara mutasi aset tetap Peralatan dan mesin secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Peralatan dan mesin di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

Tabel 5.69 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklas antar SKPD

No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
2	Dinas Perhubungan	209.880.000,00		Mutasi dari BPAD
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	483.000.000,00	220.049.999,00	Mutasi dan Keluar ke BPAD



No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
5	Sekretariat Daerah	2.154.012.500,00	1.575.134.999,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke BPAD
6	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	7.249.209.998,00	4.162.477.498,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke SKPD
7	Badan Kepegawalan Daerah	228.695.000,00		Mutasi dari BPAD
8	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	646.800.000,00		Mutasi dari BPAD
9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		222.685.000,00	Pindah ke BPAD
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		5.231.340.000,00	Pindah ke BPAD
	Jumlah	11.411.687.496,00	11.411.687.496,00	

Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat 126 kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli pada empat SKPD dikuasai atau disimpan oleh pemakai kendaraan dengan nilai aset Rp14.519.043.235,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 BPKB Kendaraan yang Disimpan oleh Pengguna Aset

No	Nama SKPD	Jumlah BPKB	Nilai (Rp)
1	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	29	7.927.610.000,00
2	Dinas Perikanan Dan Kelahahan Pangan	57	1.957.680.000,00
3	Dinas PUPR	24	4.319.030.235,00
4	Dinas Peternakan	13	314.534.000,00
	Jumlah	123	14.519.043.235,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp2.461.271.590.017,84 Rp2.297.838.521.596,67

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp2.461.271.590.017,84 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.297.838.521.596,67
2	Penambahan:	311.286.161.392,14
	Belanja Modal TA 2023	248.250.770.111,00
	Reklas Antar KIB	9.944.170.171,00
	Hibah dari Kementerian	6.106.672.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00
	Kapitalisasi	45.524.171.110,14
3	Pengurangan:	147.853.092.970,97
	Koreksi lebih Catat	45.524.171.110,14



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Rusak Berat	1.244.618.000,00
	Reklas Antar KIB	48.977.866.889,90
	Reklas dari Barjas	802.922.900,00
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	1.606.923.000,00
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	765.758.522,13
	Reklas ke Properti Investasi	13.537.438.638,80
	Reklas ke KDP di Dinas Pendidikan	35.393.393.910,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	2.461.271.590.017,84

Tabel 5.72 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.203.980.613.361,44	210.424.800.050,00	60.673.692.615,90	1.353.731.620.796,54
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	102.220.222.352,00	9.441.853.325,00	5.099.036.745,00	106.563.039.932,00
3	Dinas Kesehatan	82.920.438.627,85	1.128.033.670,00	4.768.552.667,40	79.280.920.030,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100.094.018.930,00	45.563.727.110,14	765.758.522,13	204.891.988.518,01
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana	3.975.967.425,00	-	-	3.975.967.425,00
7	Dinas Sosial	40.947.436.230,79	403.897.837,00	242.457.650,00	41.108.676.267,79
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	291.389.151,00	-	291.389.151,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.430.000.926,60	2.087.558.000,00	1.040.291.082,24	51.477.268.844,36
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.708.037.831,00	-	395.842.200,00	5.312.195.631,00
11	Dinas Perhubungan	28.058.941.863,65	4.728.787.338,00	4.728.787.338,00	28.058.941.863,65
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.102.170.000,00	-	-	2.102.170.000,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.173.048.824,00	-	-	12.173.048.824,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.261.199.025,00	-	45.428.920,00	17.215.770.105,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.790.589.178,51	-	725.442.983,77	30.065.146.194,74
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.530.280.000,00	-	2.817.507.500,00	6.712.772.500,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.417.240.151,04	10.957.050.000,00	18.267.750.000,00	57.106.540.151,04
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38.241.823.611,29	-	74.144.000,00	38.167.679.611,29
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.552.562.060,41	13.440.304.000,00	1.989.170.617,19	45.003.695.443,22
20	Dinas Peternakan	41.455.935.592,00	3.854.843.005,00	1.743.770.720,00	43.566.807.877,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.758.858.946,00	-	-	10.758.858.946,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.421.901.564,00	-	1.099.227.600,00	11.322.673.964,00
23	Sekretariat Daerah	224.844.367.364,00	-	19.500.000,00	224.824.867.364,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.310.132.230,00	-	15.438.659.568,53	10.871.472.661,47
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.817.412.250,00	-	409.657.590,00	1.407.754.660,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	61.758.249.610,59	1.062.953.250,00	22.643.490.605,59	40.177.712.255,00
27	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.970.697.400,00	196.808.000,00	2.729.456.564,00	14.437.849.836,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	183.634.000,00	-	-	183.634.000,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.667.830.126,00	-	968.662.083,22	11.678.947.442,78
32	Inspektorat Daerah	10.226.111.836,00	-	-	10.226.111.836,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.402.018.120,00	-	29.125.000,00	1.372.893.120,00
	Jumlah	2.297.838.521.596,67	313.154.473.543,14	149.721.405.121,97	2.461.271.590.017,84

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.297.838.521.596,67 maka terjadi kenaikan senilai Rp313.154.473.543,14 dan penurunan senilai Rp149.721.405.121,97 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp2.461.271.590.017,84.

Terhadap perbedaan senilai (Rp1.868.312.151,00) antara mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Gedung dan Bangunan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ke Dinas Peternakan berupa 20 Unit Gedung di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp1.606.923.000,00 dan mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp261.389.151,00 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, pagar permanen dan gedung garasi.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp6.819.220.982.207,81 Rp6.509.714.653.635,49

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp6.819.220.982.207,81 merupakan seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dalam kondisi dipakai dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	6.509.714.653.635,49
2	Penambahan:	320.913.524.383,45
	Belanja Modal TA 2023	155.271.232.138,00
	Reklas Antar KIB	100.369.346.959,00
	Koreksi Tambah Aset dari Bunga	62.884.046.386,00
	Kapitalisasi Bunga di Dinas PUPR	2.125.623.660,44
	Kapitalisasi di Dinas PUPR	263.275.240,01
3	Pengurangan:	11.407.196.811,13
	Reklas antar KIB	5.885.282.200,00
	Reklas ke Barjas	365.972.900,00
	Reklas ke Barjas di Dinas PUPR	1.024.047.372,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	337.947.500,00
	Koreksi Kurang	263.275.240,01
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	3.530.670.599,12
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	6.619.220.982.207,81

Tabel 5.74 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.862.438,00	87.499.700,00	-	8.161.362.138,00
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.030.775.858,00	348.305.000,00	7.799.203,00	6.371.284.655,00
3	Dinas Kesehatan	5.104.032.816,00	-	-	5.104.032.816,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.267.388.267.476,23	293.109.535.424,45	10.638.865.071,72	6.636.658.817.828,56
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	138.819.750,00	-	-	138.819.750,00
7	Dinas Sosial	1.532.306.600,00	-	-	1.532.306.600,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.495.000,00	101.283.140,00	-	131.778.140,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.016.504.227,00	-	101.283.140,00	8.016.504.227,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	128.638.664,00	-	-	128.638.664,00
11	Dinas Perhubungan	40.704.830.248,00	4.725.757.538,00	41.091.705,00	45.332.286.681,20
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.950.250,00	-	-	86.950.250,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	960.835.350,00	-	-	960.835.350,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	916.714.775,00	45.428.920,00	-	962.141.695,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	104.125.000,00	-	-	104.125.000,00
16	Dinas Kearifan dan Perpustakaan	189.757.950,00	-	-	189.757.950,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.156.902.022,00	22.594.050.000,00	91.207.333,33	39.659.694.688,67
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.322.248.234,76	-	-	6.322.248.234,76
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.804.024.815,00	-	-	3.804.024.815,00
20	Dinas Peternakan	6.591.049.394,00	-	337.947.500,00	6.253.101.894,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34.565.161.944,50	-	-	34.565.161.944,50
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.290.400,00	-	-	269.290.400,00
23	Sekretariat Daerah	3.293.162.783,00	-	-	3.293.162.783,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	532.859.343,00	-	623.861,08	532.235.481,92
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	230.900.000,00	-	-	230.900.000,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.988.548.236,00	337.947.600,00	435.080.332,08	1.891.415.499,91
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.162.862.800,00	-	166.988.000,00	1.995.874.800,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
28	Badan Pengelola Pertamanan	9.470.867,00	-	-	9.470.867,00
29	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	589.564.800,00	-	25.120.307,71	564.444.492,29
30	Inspektorat Daerah	514.088.164,00	-	-	514.088.164,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.197.285,00	-	-	85.197.285,00
	Jumlah	6.509.714.653.635,49	321.352.755.023,45	11.846.426.451,13	6.819.220.982.207,81

Berdasarkan saldo awal senilai Rp6.509.714.653.635,49 maka terjadi kenaikan senilai Rp321.352.755.023,45 dan penurunan senilai Rp11.846.426.451,13 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp6.819.220.982.207,81.

Terhadap perbedaan senilai Rp439.230.640,00 antara mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp101.283.140,00 berupa Instalasi Air dan Bak Penampung, serta Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Jaringan di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp337.947.500,00.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp245.951.097.870,39	Rp222.888.117.017,39

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp245.951.097.870,39 mengalami kenaikan senilai Rp23.062.980.853,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp222.888.117.017,39 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	222.888.117.017,39
2	Penambahan:	24.555.241.271,00
	Belanja Modal TA 2023	24.188.241.271,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	345.000.000,00
	Reklas dari Persediaan di Dinas Peternakan	12.000.000,00
3	Pengurangan:	1.492.260.418,00
	Koreksi Kurang Ternak Mati dan Jual di Dinas Peternakan	1.288.945.607,00
	Reklas Antar KIB	178.604.000,00
	Penghapusan di Sekda	7.799.100,00
	Kapitalisasi di Dinas Kelautan	4.000.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke Barang dan Jasa di Dinas PTSP	2.911.711,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2+3)	245.951.097.870,39

Tabel 5.76 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.314.197.178,98	22.854.541.732,00	-	223.168.738.911,98
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	92.490.480,40	-	-	92.490.480,40
3	Dinas Kesehatan	190.951.000,00	7.500.000,00	-	198.451.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	232.052.800,00	718.087.038,00	-	950.139.838,00
5	Satuan Hotel Pamong Praja	1.985.000,00	-	-	1.985.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	1.496.300,00	-	-	1.496.300,00
7	Dinas Sosial	505.604.000,00	-	-	505.604.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.559.829,00	-	-	6.311.559.829,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.956.700,00	-	-	11.956.700,00
10	Dinas Pertubungan	485.182.000,00	-	-	485.182.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.261.700,00	-	18.000.000,00	131.261.700,00
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.221.000,00	-	-	162.221.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.482.000,00	-	-	7.482.000,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	160.664.000,00	-	160.664.000,00	-
15	Dinas Keinsipen dan Perpustakaan	4.632.261.897,00	616.200.790,00	-	5.248.462.687,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	458.743.500,00	-	4.000.000,00	454.743.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	294.900.000,00	-	-	294.900.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.391.300,00	-	-	48.391.300,00
19	Dinas Peternakan	2.701.153.271,00	357.000.000,00	1.298.945.807,00	1.759.207.464,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.605.832.600,00	-	-	1.605.832.600,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	314.296.950,00	-	7.799.100,00	306.497.850,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	119.112.000,00	-	-	119.112.000,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	517.111.900,00	-	-	517.111.900,00
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	243.148.400,00	-	-	243.148.400,00
26	Badan Keuangan Daerah	10.391.000,00	-	-	10.391.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.318.400,00	-	-	120.318.400,00
29	Badan Pengelola Perbatasan	10.180.900,00	-	-	10.180.900,00
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	182.130.000,00	-	-	182.130.000,00
	Jumlah	222.888.117.017,39	24.552.329.580,00	1.489.348.797,00	245.951.097.870,39



Atas nilai Aset Tetap Lainnya terdapat informasi sebagai berikut :

- a) Aset Tetap Lainnya berupa buku pada lima sekolah tidak dapat diketahui keberadaannya senilai Rp9.858.250,00 dikarenakan sekolah belum melakukan penatausahaan buku secara tertib, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Daftar Sekolah yang Belum Melakukan Penatausahaan Buku Secara Tertib

No.	Nama Sekolah	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	SMA N 1 Amarasi Selatan	11	719.000,00
2	SMA N 2 Amarasi Selatan	30	2.745.000,00
3	SMA N 2 Kupang Barat	32	4.355.000,00
4	SMK N 1 Welak	9	1.115.000,00
5	SMA N 2 Kupang	6	884.250,00
Jumlah		88	9.818.250,00

- b) Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Hewan Ternak yang dicatat pada Instalasi Lili UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak (PTPPT) Dinas Peternakan yaitu 33 ekor Sapi Bali yang keberadaannya tidak berada pada Instalasi Lili namun pada mitra kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan Petani Mitra tetapi telah berakhir pada tahun 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan. Atas hal tersebut belum diputuskan keberlanjutan atau pengakhiran sistem kemitraan yang perjanjiannya telah berakhir pada tahun 2019 sehingga hewan ternak sapi sudah tidak lagi menjadi obyek perjanjian.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Dalam **Rp185.895.865.804,05** **Rp221.575.002.029,50**
Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp185.895.865.804,05 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	221.575.002.029,50
2	Penambahan:	43.692.720.145,55
	Reklas Antar KIB	41.901.839.144,84
	Kapitalisasi Bunga dan Biaya Pengelolaan di Dinas PUPR	1.111.023.360,71
	Koreksi Nilai Ekuitas di Dinas PUPR	215.228.890,00
	Utang di Dinas PUPR	464.628.850,00
3	Pengurangan:	79.371.856.371,00
	Reklas Antar KIB	79.371.856.371,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	185.895.865.804,05

Tabel 5.79 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10	6.325.653.400,00	-	26.217.375.536,10
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	-	1.577.681.825,00	-	1.577.681.825,00
3	Dinas Kesehatan	2.139.979.428,00	-	-	2.139.979.428,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	170.514.458.045,40	35.789.384.920,55	77.910.387.700,00	128.393.455.265,95
5	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00	-	-	97.800.000,00
6	Dinas Sosial	772.766.000,00	-	-	772.766.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.482,00	-	-	3.470.287.482,00
8	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00	-	-	1.056.374.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00	-	-	2.411.235.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00	-	-	301.570.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.094.000,00	-	-	26.094.000,00
13	Dinas Perumahan	2.061.498.671,00	-	2.061.498.671,00	-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	856.597.060,00	-	-	856.597.060,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00	-	-	1.589.000.000,00
16	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
17	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	908.098.297,00	-	-	908.098.297,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.464.521.900,00	-	-	15.464.521.900,00
	Jumlah	221.575.002.029,50	43.692.720.145,55	79.371.856.371,00	185.895.865.804,05

Berdasarkan saldo awal senilai Rp221.575.002.029,50 maka terjadi kenaikan senilai Rp43.692.720.145,55 dan penurunan senilai Rp79.371.856.371,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp185.895.865.804,05. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Pembangunan Gelanggang Pemuda senilai Rp13.390.000.000,00 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana APBN senilai Rp10.390.000.000,00 dan APBD Provinsi NTT senilai Rp3.000.000.000,00 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/1.20.00/SP2D/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dicatat sebagai belanja hibah kepada Komite Pembangunan GOR. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap KDP karena belum ada Dokumen resmi. Selama tahun 2022,



Pemerintah Provinsi NTT masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- b) Rehabilitasi Stadion Oepoi yang pada awalnya dibangun di tahun 2017 s.d. 2018 belum selesai. Pada tahun 2020 Stadion Oepoi dilanjutkan pembangunannya melalui belanja APBN Kementerian PUPR. Per 31 Desember 2020 telah dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) terhadap pekerjaan Tahap I, dengan rincian pekerjaan berupa rehabilitasi tribun utama, pembangunan tribun, dan penanaman rumput pada lapangan sepak bola. Tambahan rehabilitasi Stadion Oepoi tersebut masih belum dicatat dan dimanfaatkan karena belum ada serah terima sampai 31 Desember 2023.
- c) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair per 31 Maret 2019 progres fisik sudah mencapai 67,721%. Sampai dengan akhir tahun periode pelaporan pembangunan tersebut belum dilanjutkan.
- d) Pembangunan Tahap I Monumen Pancasila sampai dengan Juni 2019 sudah mencapai 87%. Pembangunan tersebut belum dilanjutkan.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Penyusutan (Rp5.322.782.132.401,36) (Rp4.089.662.437.531,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai (Rp5.322.782.132.401,36) dimana mengalami kenaikan senilai (Rp1.233.119.694.870,16) dari tahun sebelumnya senilai (Rp4.089.662.437.531,20) yang mencakup akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.525.419.598.594,52)	(1.116.560.510.992,76)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(582.369.523.520,36)	(446.914.922.049,22)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.234.315.668.286,48)	(2.525.428.314.089,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(677.342.000,00)	(758.690.400,00)
Jumlah	(5.322.782.132.401,36)	(4.089.662.437.531,20)

Tabel 5.81 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	(4.089.662.437.531,20)
2	Penambahan:	(1.276.020.720.747,69)
	Beban Penyusutan 2023	(645.313.209.123,18)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi kurang Catat	(15.781.010.428,09)
	Koreksi lebih catat di Dinas Pendidikan	(152.670.000,00)
	Pengakuan Aset di RSUD	(48.540.000,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset induk sebelum kapitalisasi aset rehabilitasi Gedung dan Bangunan	(33.938.764.568,56)
	Koreksi akibat perubahan Kebijakan	(580.758.244.435,86)
	Kapitalisasi	(2.142.000,00)
	LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan	(1.100.000,00)
3	Pengurangan:	(42.901.025.877,53)
	ATB	(68.180.000,00)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)
	Koreksi Lebih catat	(35.291.290.256,38)
	Penghapusan	(2.014.530.902,00)
	Reklas ke Rusak Berat	(2.686.938.045,08)
	Pengakuan Aset Properti Investasi	(2.787.119.717,18)
	Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset JIJ pada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	(33.440.514,89)
	Koreksi Lebih Catat Dinas Pendidikan	(14.486.250,00)
4	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	(5.322.782.132.401,36)

Tabel 5.82 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(679.835.632.908,51)	(324.106.753.051,94)	(21.388.965,64)	(1.003.921.296.994,81)
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(202.627.634.509,73)	(52.702.915.898,63)	-	(255.330.550.508,36)
3	Dinas Kesehatan	(112.174.693.303,63)	(36.973.060.686,03)	(330.000.000,00)	(149.147.753.989,66)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.650.136.037.944,65)	(703.746.005.543,63)	(666.268.780,16)	(3.253.211.774.708,12)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.465.474.201,60)	(658.804.452,42)	-	(3.124.278.654,02)
6	Badan Penanggulangan Bencana	(19.468.950.353,10)	(1.053.152.876,46)	-	(20.522.103.229,56)
7	Dinas Sosial	(30.985.874.552,86)	(2.555.801.507,97)	(45.000.000,00)	(33.586.676.110,83)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.419.653.679,28)	(708.467.461,20)	-	(2.128.121.140,48)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(68.706.330.507,94)	(10.601.252.508,89)	(239.003.712,05)	(89.068.579.705,77)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(3.611.234.072,52)	(424.010.708,65)	-	(4.035.234.781,17)
11	Dinas Perhubungan	(66.017.162.347,30)	(8.857.566.531,71)	-	(74.874.748.879,01)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(8.405.796.325,24)	(1.151.913.703,00)	(18.000.000,00)	(9.599.670.028,24)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.531.299.443,15)	(911.758.378,28)	(28.403.400,00)	(11.416.852.421,43)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.599.266.901,55)	(1.051.473.313,33)	(89.460.817,42)	(7.561.279.397,49)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(5.604.717.267,42)	(2.995.233.620,88)	-	(8.599.950.908,30)
16	Dinas Keartisanian dan Perpustakaan	(8.991.548.662,65)	(1.265.610.789,44)	(303.545.000,00)	(9.973.614.443,12)



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(30.380.158.630,57)	(9.847.582.588,37)	(24.813.880,27)	(40.203.125.568,87)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(9.373.389.209,25)	(5.557.988.011,63)	(222.755.000,00)	(14.708.632.220,89)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(39.857.368.363,77)	(18.003.967.703,77)	(1.267.023.279,00)	(58.894.330.786,54)
20	Dinas Peternakan	(20.887.484.164,94)	(4.401.000.904,37)	(1.155.698.334,58)	(24.132.786.734,73)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(17.651.528.797,99)	(2.719.020.617,82)	-	(20.370.549.415,81)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.141.504.220,79)	(989.571.588,48)	(158.750.000,00)	(8.972.325.809,28)
23	Sekretariat Daerah	(85.849.748.806,42)	(17.612.524.403,83)	(1.636.013.819,28)	(101.826.260.390,97)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(30.152.874.056,06)	(3.384.421.777,86)	(4.270.761.428,57)	(29.258.534.405,34)
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.640.257.381,18)	(953.366.152,11)	-	(5.598.623.513,29)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(47.469.709.921,54)	(21.172.104.208,24)	(6.281.575.705,53)	(62.380.238.422,66)
27	Badan Keuangan Daerah	(6.029.744.017,54)	(1.820.378.861,87)	-	(7.849.919.879,41)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(3.690.179.286,50)	(2.558.403.471,80)	-	(6.246.582.758,40)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(12.565.343.084,98)	(2.816.875.987,77)	(1.506.833.815,08)	(14.275.385.267,67)
30	Badan Pengelola Perbatasan	(1.535.290.019,78)	(160.864.080,30)	(151.029.450,00)	(1.546.055.650,08)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(8.223.789.008,54)	(2.975.770.261,20)	-	(11.199.559.261,74)
32	Inspektorat Daerah	(2.813.159.248,14)	(1.524.341.059,50)	(210.201.925,80)	(4.427.219.418,30)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.243.404.940,80)	(364.283.088,01)	-	(2.607.688.007,71)
	Jumlah	(4.689.662.437.531,20)	(1.251.724.100.966,55)	(18.504.405.095,39)	(5.322.782.132.401,36)

Rincian-Lengkap Aset Tetap dilihat pada Lampiran N.14 dan N.15 sedangkan Rincian Lengkap Aset yang berasal dari Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran N.14.1.

d. Properti Investasi

Properti Investasi

31 Desember 2023
Rp22.933.168.921,62

31 Desember 2022
Rp0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Saldo Properti Investasi Pemerintah provinsi NTT per 31 Desember 2023 senilai Rp25.700.288.638,80 serta terdapat Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.767.119.717,18 sehingga nilai buku Properti Investasi setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah Rp22.933.168.921,62 (Rp25.700.288.638,00 - Rp2.767.119.717,18) dimana pada tahun sebelumnya nilai Properti Investasi adalah Rp0,00, yang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Properti Investasi	25.700.288.638,80	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.767.119.717,18)	0,00



No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Jumlah	22.933.168.921,62	0,00

Properti Investasi terdiri atas enam aset yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Properti Investasi

No.	SKPD	Nilai Perolehan Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nilai Buku Properti Investasi	Keterangan
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
a	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.824.100.000,00		6.824.100.000,00	Tanah Belakang Hotel Cendana
b	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00	Tanah Bangunan Gedung Bank Bukopin (Eks. Gedung Ade Irma)
c	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toka/Koperasi	3.508.750.000,00		3.508.750.000,00	Tanah Ruko Frienship (Eks. Taman APDN)
d	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	8.098.267.575,20	2.106.549.589,55	5.992.718.005,65	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen Ruko Frienship
e	Pagar Permanen	147.827.000,00	26.608.880,00	121.218.140,00	Pemagaran Ruko Frienship
f	Bangunan Gedung Kuliner Permanen	5.291.344.063,60	634.961.287,63	4.656.382.775,97	Bangunan Ruko Kawasan Wisata Kuliner Lokasi I Opoi
	Jumlah	25.700.288.638,80	2.767.119.717,18	22.933.168.921,62	

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.16

e. Dana Cadangan

Dana Cadangan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp211.429.551.796,31	Rp101.018.749.999,69

Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp211.429.551.796,31 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Saldo Dana Cadangan pada Tahun 2023 senilai Rp211.429.551.796,36 di mana terdapat peningkatan senilai Rp110.410.801.796,67 dari tahun sebelumnya senilai Rp101.018.749.999,69. Dana Cadangan pada Tahun 2023 terdiri dari Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp203.511.200.000,00 ditambah Jasa Giro senilai Rp25.643.463,39 dan bunga Deposito senilai Rp7.892.708.332,92.

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada Lampiran N.17.



f. Aset Lainnya

Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp393.018.493.957,97	Rp373.972.116.462,34

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 senilai Rp393.018.493.957,97 dimana mengalami peningkatan senilai Rp19.046.377.495,63 dari tahun sebelumnya senilai Rp373.972.116.462,34. Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.578.121.184,88	35.243.950.000,00	18.334.171.184,88
2	Aset Tidak Berwujud	15.317.022.173,00	15.174.682.173,00	142.340.000,00
3	Aset Lain - Lain	338.126.806.131,20	330.225.552.209,65	7.901.253.921,55
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.003.465.531,11)	(6.672.067.920,31)	(7.331.397.610,80)
	Jumlah	393.018.493.957,97	373.972.116.462,34	19.046.377.495,63

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp53.578.121.184,88	Rp35.243.950.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp 53.578.121.184,88 merupakan nilai bersih dari Aset Tetap Tanah senilai Rp54.759.930.961,54 dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.181.809.776,66. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 senilai Rp35.243.850.000,00, di mana terdapat kenaikan nilai Bersih atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp18.334.271.184,88 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kenaikan signifikan karena adanya penambahan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pendapatan Aset Daerah kepada PT Komodo Kawisata Paratama dan PT Asiabeef Biofarm Indonesia. Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya Kerjasama Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dengan jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, rincian sebagai berikut.

- PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ±18.214 m², sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983,HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00;
- PT Sarana Investama Manggabar sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah



(BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah ±31.670 m², sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggabar telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan. Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ±31.670 m², sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00;

- c) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Pulau Purung Ds. Warloka, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, sertifikat Nomor HPL.00004/2023 tanggal 24 November 2023 oleh PT Komodo Kawisata Pratama dengan Nomor: BU.000.2.3.2/168/BPAD/2023 dan Nomor: 027/KKP-PNTT/HPL/VIII/2023 tentang Pemberian Kewenangan oleh Negara kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk Pengelolaan selama 50 tahun sejak tanggal 31 Agustus 2023 dan berakhir pada 30 Agustus 2073 senilai Rp17.496.172.000,00;
- d) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Desa Kabar, Kec. Rindi Kab. Sumba Timur, sertifikat Nomor: 00002/2023 tanggal 13 Juli 2023 oleh PT Asiabief Biofarm Indonesia dengan Nomor: BU.030/80/BPAD/2023 dan Nomor: S.PMH/LGL-ABI/III/006/23 selama 30 tahun dengan status tanah yakni Hak Pakai berupa Tanah Peternakan dan Tanah Mess di kabar senilai Rp74.938.461,54 dan 20 (dua puluh) unit Gedung dan Bangunan Mess senilai Rp1.606.923.000,00 dan Jaringan Rumah Tangga senilai Rp337.947.500,00 dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun sejak tanggal 13 Juli 2023 dan berakhir pada 13 Juli 2053; dan
- e) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata *Estate* di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut.

- a) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah ±60.060 m², sertifikat Tanah



Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;

- b) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 1.710 m², sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- c) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 6.595 m², sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- d) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/IIIR/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 12.040 m², sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.18, N.18.1 dan N.18.2.

2) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.313.566.641,89	Rp8.502.614.252,69

Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2023 senilai Rp1.313.566.641,89 terdiri saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.317.022.173,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp142.340.000,00 dikurangi Akumulasi Amortisasi senilai (Rp14.003.455.531,11) dan saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 senilai Rp8.502.614.252,69 merupakan saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 dikurangi saldo Akumulasi Amortisasi tahun 2022 senilai (Rp6.672.067.920,31). Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud secara signifikan senilai (Rp7.189.047.610,80) dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi. Rincian penambahan Aset Tak Berwujud pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.86 Aset Tak Berwujud SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.785.017.500,00	0,00	6.785.017.500,00	(6.785.017.500,00)	0,00
2	Dinas Kesehatan	432.910.000,00	0,00	432.910.000,00	(303.368.000,00)	129.552.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	867.859.995,00	0,00	867.859.995,00	(867.397.597,00)	202.398,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	1.445.568.634,00	0,00	1.445.568.634,00	(1.445.568.634,00)	0,00
5	Dinas Perhubungan	47.795.000,00	0,00	47.795.000,00	(47.795.000,00)	0,00



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.259.790,00	0,00	277.259.790,00	(212.870.965,00)	64.388.824,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.200.800.000,00	0,00	2.200.800.000,00	(1.348.280.000,00)	852.520.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.113.000,00	104.000.000,00	374.113.000,00	(369.855.800,00)	4.257.200,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	330.527.500,00	15.000.000,00	345.527.500,00	(325.782.000,00)	19.735.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00	(59.950.000,00)	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	82.425.750,00	0,00	82.425.750,00	(82.588.950,00)	29.836.800,00
12	Dinas Peternakan	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	(4.668.000,00)	18.672.000,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.393.100,00	0,00	111.393.100,00	(91.431.180,00)	19.961.920,00
14	Sekretariat Daerah	480.662.000,00	0,00	480.662.000,00	(432.662.000,12)	47.999.999,88
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	856.855.000,00	0,00	856.855.000,00	(766.075.000,00)	100.780.000,00
17	Badan Keuangan Daerah	84.250.000,00	0,00	84.250.000,00	(78.250.000,00)	6.000.000,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	728.894.904,00	0,00	728.894.904,00	(728.894.904,00)	0,00
19	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
20	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	10.000.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	(37.600.000,00)	9.400.000,00
	Jumlah	15.174.682.173,00	142.340.000,00	15.317.022.173,00	(14.003.455.531,12)	1.313.566.641,88

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.19.

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp7.330.387.610,80) dari saldo awal senilai (Rp6.672.067.920,31) menjadi (Rp14.003.455.531,11) yang diperoleh dari penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp2.107.242.677,06) dan koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi senilai (Rp5.224.144.933,74). Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud secara signifikan dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi.

3) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp338.126.806.131,20	Rp330.225.552.209,65

Saldo Aset Lain-Lain pada Tahun 2023 adalah senilai Rp338.126.806.131,20 mengalami kenaikan senilai Rp7.901.253.921,55 dari tahun sebelumnya yaitu Rp330.225.552.209,65. Aset Lain-Lain pada Pemerintah Provinsi NTT dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat yang ada di SKPD lingkup Pemerintah



Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp127.047.450.146,70 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp83.578.041.212,25).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.1**.

- b) **Aset Lain-lain yang dialihkan dari Aset Lancar** senilai Rp234.722.368,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp44.894.125,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2023 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.2**

- c) **Aset Lain-lain yang tidak Digunakan Pemerintah** senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.3**

- d) **Aset Lain-lain untuk Dihapus** senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISIMP)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.4**

- e) **Aset yang akan Diserahkan kepada Masyarakat** senilai Rp29.225.975.028,75 dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
 - (2) Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp9.864.901.278,75;
 - (3) Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;



(4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00, yang terdiri atas:

(a) Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2023 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan

(b) Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.20 dan N.20.5.

f) **Aset Lain-lain Lainnya** senilai Rp262.056.522.000,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT yang dapat dirincikan sebagai berikut.

(a) Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang semula saldo awal senilai Rp5.868.405.000,00 namun tahun 2022 tanah atas aset tersebut telah dibeli senilai Rp500.001.000,00 pada Desa Utiuhuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor maka aset berupa Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah tersebut senilai Rp4.680.805.000,00 telah dialihkan ke jenis Aset berkenaan. Berdasarkan temuan BPK bahwa aset senilai Rp1.187.600.000,00 tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT belum mengeluarkan karena akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, serta memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2022 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga aset tetap tanah seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke aset lainnya



sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK);

- (b) Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00. Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjasamakan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan. Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m² atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500 lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemprov NTT oleh PT Semen Kupang seluas ±1.029.500 m². Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena



itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas ±1.029.500 m² yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai aset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 (1.029.500 m² x Rp243.000,00), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020; dan

- (2) Aset Lain-lain Lainnya berupa pendapatan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp9.512.822.000,00 yang diperoleh dari fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: S-220/KPN.2401/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.20, N.20.6, N.20.6.1 dan N.20.6.2

2. KEWAJIBAN

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.195.417.144.551,08	Rp1.267.002.282.371,77

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Bagi Hasil Pajak serta Utang kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (PT SMI-PEN).

Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp1.195.417.144.551,08 dimana terdapat penurunan senilai Rp71.585.137.820,69 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.267.002.282.371,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Nilai Kewajiban

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kewajiban Jangka Pendek	398.959.631.717,08	286.124.959.115,77	112.834.672.601,31	39,44
Kewajiban Jangka Panjang	796.457.512.834,00	980.877.323.256,00	(184.419.810.422,00)	(18,80)
Jumlah	1.195.417.144.551,08	1.267.002.282.371,77	(71.585.137.820,69)	5,66

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp398.959.631.717,08	Rp286.124.959.115,77

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp398.959.631.717,08 mengalami kenaikan senilai Rp112.834.672.601,26 atau 39,43% dari tahun 2022 senilai Rp286.124.959.115,77, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	201.458.557,00	-	201.458.557,00
2	Utang Bunga	55.688.549.678,00	61.069.423.338,00	(5.380.873.660,00)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	159.640.544.218,00	-	159.640.544.218,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	2.090.653.209,23	1.281.125.050,05	809.528.159,18
5	Utang Belanja dan Transfer	181.338.426.056,65	23.531.085.676,72	157.807.340.380,13
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	200.243.325.051,00	(200.243.325.051,00)
	Jumlah	393.959.631.717,08	286.124.959.115,77	112.834.672.601,31

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp201.458.557,00	Rp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp201.458.557,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada 24 (dua puluh empat) sekolah atas PPh 21 senilai Rp13.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.140.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023. Atas pajak ini telah disetor seluruhnya di tahun 2024 dan telah didukung dengan bukti setor. Dimana pada tahun sebelumnya tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga atau bersaldo Rp0,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.21,N.21.1,N.22, dan N.22.1.

2) Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp55.688.549.678,00	Rp61.069.423.338,00

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan bukan Bank atas Kewajiban bunga Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN untuk pembayaran bunga selama tahun 2024 senilai Rp55.688.549.678,00 dimana saldo Utang Bunga pada tahun 2022 adalah senilai Rp61.069.423.338,00 yang telah dilakukan pembayaran pada tahun 2023. Nilai Utang Bunga senilai 55.688.549.678 sesuai dengan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023